

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Masalah kerawanan pangan yang masih terjadi hingga saat ini menandakan bahwa perlunya penanganan serius. Kerawanan pangan berakar dari masalah ekonomi yang merambat dan merugikan sektor lokal ditambah dengan bencana, konflik dan perubahan iklim. Sri Lanka merupakan salah satu negara yang terdampak yang sudah lama yang masih berlangsung hingga saat ini. Kemunduran presiden yang bertugas saat itu dianggap menjadi awal mulanya masalah ini merambat ditambah dengan pandemic COVID-19 menjadikan Sri Lanka tidak dapat mengakses dan menjangkau pasokan makanan kepada masyarakat terlebih masyarakat daerah pedalaman. Dari hasil analisis terhadap laporan WFP selama periode 2019-2022, WFP memainkan peran yang sangat strategis dalam membantu Sri Lanka menghadapi krisis pangan. WFP membentuk CSP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program bentuk peran WFP sebagai instrumen. Selama empat tahun tersebut, WFP hadir tidak hanya sebagai lembaga pemberi bantuan pangan semata, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang menyeluruh.

Berdasarkan rumusan masalah dan juga hasil temuan, keterlibatan WFP di Sri Lanka dapat dipahami melalui kerangka teori organisasi internasional menurut Clive Archer yang membagi peran organisasi internasional menjadi tiga kategori yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Ketiga peran tersebut dijalankan secara simultan oleh WFP, namun dengan intensitas dan kedalaman peran yang berbeda-beda sepanjang periode krisis.

Pertama, peran WFP sebagai instrumen tampak melalui pelaksanaan berbagai program bantuan pangan langsung, seperti distribusi makanan siap saji, bantuan tunai (cash-based transfers), dan voucher elektronik kepada rumah tangga rentan di berbagai distrik. WFP juga menjadi pelaksana teknis dari program nasional seperti *National School Meals Programme*, di mana WFP menyalurkan ikan kaleng dan bantuan

THR selama masa penutupan sekolah akibat pandemi. Peran ini menggambarkan fungsi WFP sebagai pelaksana bantuan dari negara donor, serta penguat kapasitas distribusi pangan negara tuan rumah.

Kedua, peran sebagai arena terwujud melalui inisiatif WFP dalam membangun dan memfasilitasi platform kolaboratif antar aktor internasional, nasional, dan lokal. Contohnya adalah pelaksanaan *Dialog Nasional Sistem Pangan* menuju *World Food Systems Summit* tahun 2021 yang mempertemukan pemerintah, akademisi, petani, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam menyusun peta jalan reformasi sistem pangan nasional. Selain itu, WFP memfasilitasi pembentukan *SUN Business Network* dan kerja sama dengan mitra seperti FAO, UNICEF, dan IFAD dalam menyelaraskan strategi ketahanan pangan. Peran ini menunjukkan fungsi WFP sebagai ruang interaksi antar aktor, meski dengan posisi dominan sebagai pemimpin proses.

Ketiga, dan yang paling menonjol, adalah peran WFP sebagai aktor independen yang memiliki kapasitas untuk bertindak secara otonom dalam merancang strategi, menyusun kebijakan, dan menjalankan program berdasarkan analisis dan pengetahuan teknisnya sendiri. Sepanjang tahun 2019–2022, WFP tidak hanya menanggapi situasi darurat, tetapi juga memimpin berbagai inisiatif strategis seperti peluncuran *R5n Framework*, pengembangan *Cost of Diet Analysis*, pengusulan integrasi *Food Insecurity Experience Scale* ke dalam survei nasional, serta penggunaan alat pemantauan mandiri seperti *High-Frequency Food Security Surveys (HFFSS)* dan *Market Functionality Index (MFI)*. Hingga WFP juga menerapkan pendekatan *Social and Behavior Change Communication (SBCC)* dan memperkenalkan *Home-Grown School Feeding (HGSF)* yang mengintegrasikan pertanian lokal dengan program gizi di sekolah.

Dari seluruh periode tersebut, terlihat bahwa WFP secara konsisten menjalankan peran sebagai aktor, arena, sekaligus instrumen dalam tatanan organisasi internasional. Dengan demikian, keterlibatan WFP di Sri Lanka selama krisis pangan tidak hanya memperlihatkan kapasitas teknis dan

logistik organisasi, tetapi juga menggambarkan dinamika organisasi internasional kontemporer yang dapat menjalankan multi-peran secara simultan dan fleksibel. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi internasional tidak dapat dilihat secara satu sisi, melainkan harus dianalisis dalam kompleksitas peran-peran yang dijalankan dalam kondisi krisis yang terus berubah.

VI.2 Saran

a. Praktis

Krisis pangan di Sri Lanka membuktikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, kapasitas institusi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran *World Food Programme* (WFP) dalam menangani krisis pangan di Sri Lanka, terdapat sejumlah saran yang dapat disampaikan kepada negara-negara berkembang serta pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam isu ketahanan pangan global.

Pertama, bagi negara-negara berkembang sangat penting untuk menyadari bahwa krisis pangan bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya pasokan makanan, melainkan juga oleh lemahnya sistem kelembagaan, ketidaksiapan menghadapi bencana, serta kebijakan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu memperkuat sistem pangan nasional mereka dengan cara membangun kapasitas kelembagaan yang andal, meningkatkan kualitas data dan informasi pangan, serta membentuk sistem peringatan dini yang efektif. Di samping itu, diversifikasi sumber pangan lokal, penguatan produksi pertanian berbasis komunitas, dan pemberdayaan petani kecil menjadi kunci penting untuk menciptakan sistem yang resilien terhadap guncangan krisis.

Kedua, bagi pemerintah Sri Lanka dan negara-negara yang menghadapi kondisi serupa dimana pengalaman krisis pangan harus menjadi pelajaran penting untuk tidak hanya bergantung pada intervensi bantuan dari luar. Pemerintah perlu meningkatkan investasi di sektor

pertanian dan pangan, tidak hanya dalam hal produksi, tetapi juga dalam infrastruktur pendukung seperti irigasi, penyimpanan hasil panen, dan akses pasar. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti WFP hendaknya diposisikan sebagai kemitraan jangka panjang, bukan hanya sebagai penerima bantuan. Selain itu, sistem perlindungan sosial harus diperkuat agar mampu merespons kerentanan masyarakat secara cepat dan tepat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat berpendapatan rendah.

Ketiga, bagi organisasi internasional dan komunitas internasional dimana pendekatan yang diambil dalam merespons krisis pangan sebaiknya tidak terbatas pada bantuan darurat, melainkan diarahkan pada pembangunan jangka panjang yang berbasis bukti dan partisipatif. Inovasi seperti pemantauan berbasis data real-time, pengukuran kerawanan pangan berbasis pengalaman, dan pelibatan komunitas lokal dalam desain program merupakan langkah strategis yang perlu terus diperluas. Organisasi internasional juga diharapkan menjadi jembatan dalam transfer pengetahuan dan praktik terbaik antarnegara berkembang, serta mendorong fleksibilitas pendanaan multilateral yang mendukung agenda pembangunan pangan secara berkelanjutan.

b. Akademis

Melihat kompleksitas isu krisis pangan yang terjadi di Sri Lanka dan bagaimana WFP terlibat dalam upaya penanganannya, maka penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan perspektif *human security* dalam menganalisis dampak jangka panjang dari kerawanan pangan terhadap kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dari perspektif tersebut dapat mengembangkan analisis mengenai bagaimana krisis pangan mempengaruhi dimensi keamanan manusia secara lebih luas, seperti potensi meningkatnya konflik sosial akibat perebutan sumber daya pangan, kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi, dan berkurangnya akses terhadap pendidikan akibat anak-anak yang harus bekerja demi membantu kebutuhan keluarga. Dengan demikian, pendekatan *human security* akan

membuka ruang kajian yang lebih luas mengenai dampak sistemik dari krisis pangan, tidak hanya dari segi ketahanan pangan, tetapi juga dari sisi pembangunan manusia secara keseluruhan.